Implementasi Model Penyaluran Program Bantuan Sosial Pemberdayaan Ekonomi untuk Petani Serai Wangi

Implementation Social Assistance Program Concept Economic Empowerment for Self- Reliance of Citronella Farmers

Adam*

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 4 Oktober 2019; Disetujui: 30 Oktober 2019; Diterbitkan: 6 Januari 2020.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis Implementasi, faktor penghambat dan pendukung, konsep penyaluran program bantuan sosial pemberdayaan ekonomi untuk petani serai wangi di Kabupaten Gayo Lues. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi model penyaluran program bantuan sosial pemberdayaan ekonomi dilakukan dengan model *by name by address* dan pelaksanaannya berjalan dengan efektif ditandai dengan tercapainya target minimal lahan yang ditanami oleh petani serai wangi sesuai dengan nama dan alamat petani. Faktor penghambatnya, apabila dilihat dari isi kebijakan, masih kurangnya dukungan sumber daya manusia, sumber pendanaan, sarana prasarana, dan teknologi. Faktor penghambat, jika dilihat dari konteks kebijakan meliputi: Aneka kepentingan oknum implementor yang terlibat pelaksanaan program, penegakan hukum, lokasi usaha petani, dan pemasaran. Faktor Pendukung isi kebijakan adalah pengaruh kepentingan lebih sedikit, perubahan perilaku bertanggung jawab, transparan, tugas dan fungsi jelas, motivasi kerja yang tinggi, koordinasi dan komunikasi yang baik, pengambilan keputusan oleh pimpinan daerah, serta dukungan yang kuat dari masyarakat petani. Pendukung konteks kebijakan adalah adanya payung hukum, kepentingan lebih sedikit, berorientasi pemberdayaan, berpedoman pada peraturan. Konsep penyaluran program Bantuan Sosial Pemberdayaan Ekonomi Petani Serai Wangi dengan menggunakan Konsep PASTI (Pengawasan, Akuntabilitas, Sumber Daya, Tindakan Hukum, Implementasi).

Kata Kunci: Kebijakan, Bantuan Sosial, Pemberdayaan Ekonomi

Abstract

The purpose of this study was to analyze the Implementation, inhibiting and supporting factors, the concept of distribution of social assistance programs for economic empowerment for citronella farmers in Gayo Lues Regency. Data collection techniques through interviews, observation, documentation, triangulation. The results showed that the implementation of the distribution model of social assistance programs for economic empowerment was carried out by a model by name by address and the implementation was carried out effectively marked by the achievement of the minimum target of land planted by lemongrass farmers according to the name and address of the farmer. The inhibiting factor, when viewed from the contents of the policy, is still lack of support from human resources, funding sources, infrastructure, and technology. Inhibiting factors, when viewed from the policy context include: Various interests of individual implementors involved in program implementation, law enforcement, farmer business locations, and marketing. Supporting factors for policy content are the influence of fewer interests, changes in responsible behavior, transparency, clear tasks and functions, high work motivation, good coordination and communication, decision making by regional leaders, and strong support from the farming community. Supporting the policy context is the existence of a legal umbrella, fewer interests, empowerment oriented, based on regulations. The concept of channeling the Social Assistance Program for Economic Empowerment of Serai Wangi Farmers by using the PASTI Concept (Supervision, Accountability, Resources, Legal Actions, Implementation).

Keywords: Policy, Social Assistance, Economic Empowerment

How to Cite: Adam (2020). Implementasi Model Penyaluran Program Bantuan Sosial Pemberdayaan Ekonomi Untuk Petani Serai Wangi. *PERSPEKTIF*, 9 (1): 66-78.

*Corresponding author:

E-mail: adam@staff.uma.ac.id

PENDAHULUAN

Upaya pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan tak dapat dilakukan hanya dengan menitikberatkan pada fungsi perlindungan semata, maka fungsi pemerintah tidak saja dalam hal pelayanan publik (*public services*), pembuatan aturan (*regulation*) dan pembangunan masyarakat (*development*), demikian pula fungsi pemberdayaan bagi setiap individu dalam masyarakat (*empowerment*). Dalam pemerintahan dewasa ini Rasyid (2000) membagi fungsi pemerintahan menjadi empat fungsi yaitu pelayanan (*public service*), pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowering*), dan pengaturan (*regulation*). Jika pemerintah melakukan fungsinya dengan baik, maka tugas-tugas pokok dapat terlaksana dengan baik. Fungsi pelayanan diharapkan dapat membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan diharapkan mampu mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Fungsi penguatan sumber daya adalah segala aktivitas pemerintahan yang tidak saja berorientasi pada pembangunan kesadaran, demikian pula seperangkat tindakan bagi peningkatan kemampuan setiap individu dalam masyarakat agar berubah dari kondisi ketidakmampuan, ketertinggalan, kemiskinan, kebodohan dan kemalasan pada suatu kondisi yang bersifat mampu, maju, kaya, pandai dan rajin. Aktivitas semacam ini dalam konteks pemerintahan berkembang menjadi suatu fungsi pemerintahan yaitu fungsi pemberdayaan masyarakat (*public empowerment*).

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kemandirian bagi setiap individu agar mampu mengubah pola pikir dan tindakan secara bertahap sehingga tercipta perubahan yang dapat mempengaruhi kelompok masyarakat secara keseluruhan (Hidayat, 2016; Hulu, 2018). Perubahan dan interaksi dalam kelompok secara luas dapat mendorong perubahan masyarakat pada umumnya. Perubahan tersebut secara khusus diarahkan pada upaya perbaikan keadaan diri untuk menjadi lebih baik dan meningkat dari aspek kemandirian di bidang politik, sosial maupun ekonomi. Pada tingkat selanjutnya perubahan dimaksud diarahkan untuk menciptakan efek

dalam lingkungan yang lebih luas yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat sebagai dampak positif atas perubahan masyarakat. Fungsi pemberdayaan ini adalah untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, kebijakan pemerintah pusat dan daerah diarahkan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat yang dapat membantu pemerintah daerah, pemerintah harus memberi ruang yang cukup untuk aktifitas mandiri masyarakat sehingga nantinya partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan.

Secara umum pemerintah menjadi tumpuan pertama dalam upaya mempercepat terjadinya perubahan dari tingkat atas hingga level terendah (Tahjan, 2007). Pemerintah memiliki peranan penting dan menentukan dalam pemenuhan dan pelayanan kebutuhan masyarakat, pelayanan pemerintah terhadap masyarakat merupakan suatu kebutuhan dan keharusan karena rakyat adalah pemegang kedaulatan negara. Dengan memahami kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah masing-masing maka persoalan selanjutnya dapat dinyatakan bahwa pada tingkat implementasi menjadi penting bagi pemerintah untuk menemukan mekanisme yang efektif dengan sumber daya yang tersedia (Purwanto, 2012). Hal ini digunakan melakukan berbagai terobosan dalam bentuk kebijakan umum, program strategis serta operasionalisasi kegiatan sehingga mampu menciptakan perubahan bagi setiap individu dan kelompok masyarakat pada umumnya. Dalam kaitan itulah kewenangan daerah otonom yang ada diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Terkait kewenangan pemerintah daerah otonom dalam mengembangkan berbagai gagasan, ide, inspirasi dan inovasi guna menemukan kebijaksanaan yang efektif dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, Kabupaten Gayo Lues sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Aceh yang dibentuk sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tenggara sejak tahun 2002 telah melaksanakan berbagai kebijakan dalam berbagai bentuk program dan kegiatan. Salah satu program yang dijalankan adalah Program bantuan sosial yang diberikan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dari tahun ke tahun menggunakan konsep yang sama yaitu memberikan bantuan kepada petani dengan

berbagai komoditi melalui kelompok tani, namun hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan yang diharapkan. Karena kondisi pemberdayaan ekonomi yang diperoleh selama ini kurang efektif, maka Pemerintah Kabupaten Gayo Lues terus berupaya untuk membuat solusi dan mencari komoditi yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan bisa menjadi produk andalan daerah, dan salah satu jenis komoditi yang dipilih adalah jenis tanaman serai wangi.

Penanganan terhadap komoditi ini diambil kebijakan khusus, dengan konsep penyaluran yang berbeda dari yang dilaksanakan selama ini. Mulai pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Gayo Lues membuat kebijakan yaitu membuat program kegiatan berupa pemberian bantuan sosial pemberdayaan ekonomi bagi petani yang melakukan usaha tanaman serai wangi, dan model penyaluran bantuan yang dilakukan tidak lagi seperti yang dilaksanakan selama ini melalui kelompok tani/organisasi akan tetapi dengan menggunakan model baru yaitu bantuan diberikan secara langsung ke individu atau perorangan (*by name by address*). Program bantuan sosial pemberdayaan ekonomi petani serai wangi ini diartikan sebagai pemberian bantuan berupa barang/uang/jasa yang diberikan kepada petani serai wangi dengan tujuan untuk peningkatan pemanfaatan lahan tidur, menciptakan lapangan kerja, penggunaan teknologi pertanian, meningkatkan produksi usaha petani, meningkatkan pendapatan petani, dan meningkatkan kesejahteraan petani serai wangi di Kabupaten Gayo Lues.

Komoditi serai wangi ini dipilih dan dibuat kebijakan khusus karena sejak berdirinya Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dengan berbagai program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan, namun faktanya program yang dijalankan belum memberikan hasil yang optimal bahkan sering menimbulkan masalah sosial dan masalah yang terkait kasus hukum, sebelum tahun 2013 program yang disalurkan belum pernah menyentuh petani serai wangi walaupun secara aturan bahwa program bantuan untuk pemberdayaan petani serai wangi diperbolehkan. Selain itu dilihat dari struktur tanah, jenis tanaman sangat sesuai dengan karakteristik masyarakat dan kondisi wilayah Kabupaten Gayo Lues yang wilayahnya

dipenuhi oleh pohon pinus, budiddayanya mudah, lokasi untuk pengembangan masih luas, memiliki peluang bisnis yang bagus. Serai wangi sejenis tanaman rumput yang tidak terlalu tinggi dan mempunyai rimbunan daun yang lebat, berwarna hijau muda, kasar dengan urat yang selari dan mempunyai aroma yang lebih kuat jika dibandingkan dengan serai makan, jenis tanaman ini mempunyai prospek yang bagus untuk usaha yang menghasilkan pendapatan bagi masyarakat. Selama ini program bantuan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat atau petani yang dilaksanakan berpedoman kepada peraturan yang dibuat baik itu dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pihak yang membuat aturan mencantumkan persyaratan untuk petani yang akan menerima bantuan di berbagai program harus tergabung dalam grup atau kelompok tani, Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah seolah-olah dapat diterapkan di semua program dan kondisi serta diseluruh wilayah Indonesia, faktanya hasil program yang dilakukan tidak seperti yang diharapkan di lapangan. Kebijakan program bantuan yang telah dibuat dengan peraturan Pemerintah tidak semua dapat diaplikasikan di daerah, apalagi peraturan yang mengatur dan dibuat persyaratan berorientasi hanya untuk sekedar melepas tanggung jawab dan untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan, tidak berorientasi untuk yang benar-benar dapat memberikan manfaat atau hasil yang optimal kepada masyarakat petani maka akan semakin mempersulit pelaksanaan di lapangan, bahkan kalau dilaksanakan akan menimbulkan permasalahan secara hukum.

Pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai terobosan baru lewat kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan fokus bantuan sosial pada petani budi daya tanaman serai wangi baru dimulai oleh Pemerintah Kabupaten Gayo Lues sejak tahun 2013 sebagai salah satu solusi untuk mengatasi berbagai hambatan pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat selama ini terhadap objek garapan bantuan sosial. Pemerintah Gayo Lues mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sebagai dasar pijakan kebijakan baru, ini sebagai kritik sekaligus respon terhadap kegagalan kebijakan lama yang

dinilai bersifat rutin dan formalistik. Untuk memperkuat kebijaksanaan tersebut Bupati Gayo Lues mengeluarkan dua instrumen turunan yaitu Surat Keputusan Nomor 050/354/2013 tentang Tim Pengendali Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Gayo Lues sebagai dasar bagi Tim dilapangan yang dalam hal ini diketuai oleh Wakil Bupati Gayo Lues Selanjutnya dikeluarkan pula Surat Keputusan Nomor 050/353 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Tim Pengendali, Koordinasi Percepatan Pembangunan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sebagai dasar bagi Tim Monitoring.

Penerapan program bantuan sosial pemberdayaan ekonomi bagi petani serai wangi akan melahirkan dampak berupa meningkatnya motivasi petani melaksanakan usahanya dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, tumbuhnya interaksi kemitraan antara pengendali, pelaksana, dan penerima bantuan yang bersifat peduli dengan pikiran jernih, transparan, kerja keras, bertanggung jawab dan ikhlas dalam melaksanakan program serta mampu memberikan sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kemandirian petani serai wangi dalam mengembangkan usahanya. Petani serai wangi akan mandiri dan sejahtera apabila sudah mampu mengelola dan melaksanakan usahanya untuk memenuhi kebutuhannya atas dorongan sendiri dan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya tanpa meminta bantuan lagi kepada orang lain. Pelaksanaan dari model program ini tentu masih banyak mengalami berbagai kendala sehingga hasil program belum tentu dapat diperoleh secara maksimal dan untuk mengetahui bagaimana kondisi yang sesungguhnya tentu akan diperoleh jawaban dari hasil penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bagaimanakah model penyaluran program bantuan sosial pemberdayaan ekonomi untuk Petani Serai wangi di Kabupaten Gayo Lues, mengetahui, mengkaji dan menganalisis faktor-faktor penghambat dan pendukung, serta memberikan konsep baru yang di harapkan untuk penyaluran program bantuan sosial pemberdayaan ekonomi untuk petani serai wangi di Kabupaten Gayo Lues.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kualitatif di dukung data kuantitatif lewat penyajian deskriptif. Dalam penelitian kualitatif, sumber data person yang merupakan responden dari pihak-pihak yang berhubungan dengan program, sumber data dibagi dua yaitu data primer dan data skunder (Arikunto, 2010)

Teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk menentukan sumber data atau informan adalah dipilih berdasarkan teknik *snowball* yaitu dengan mencari informan kunci. Yang dimaksud dengan informan kunci (*key informan*) adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian atau informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti Creswell (2010). Adapun teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data yaitu: Wawancara, Observasi, Study Dokumentasi dan Triangulasi (Dawson, 2002).

Ruang lingkup penelitian merupakan batasan-batasan pemahaman yang akan dibahas, ruang lingkup disini adalah bagaimanakah model/konsep penyaluran program bantuan social pemberdayaan ekonomi untuk petani serai wangi di Kabupaten Gayo Lues, faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi model penyaluran program bantuan social pemberdayaan ekonomi untuk petani serai wangi di Kabupaten Gayo Lues.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Program Bantuan Sosial Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi masyarakat dimaksudkan di sini adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan daya atau potensi atau kemampuan masyarakat dalam kegiatan ekonomi untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup dan terus dala proses pembangunan. Pemberian bantuan baik berbentuk modal maupun prasarana yang dilakukan telah dianggarkan dalam jumlah yang cukup signifikan lewat berbagai SKPD terkait dengan program masing-masing yang diusulkan lewat perencanaan pembangunan setiap tahun.

Dari hasil kajian dan berdasarkan fakta dilapangan ternyata pelaksanaan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan

selama ini kurang efektif, disebabkan bantuan melalui kelompok tani kurang tepat sasaran karena heterogenya usaha anggota di kelompok tani tersebut, komitmen dari pelaksana dan penerima bantuan untuk menjalankan program belum seperti yang diharapkan dan banyak terjadi penyimpangan pemanfaatan bantuan, ini terlihat adanya kasus hukum dengan bantuan ke kelompok tani. Program bantuan sosial yang diberikan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dari tahun ke tahun menggunakan konsep yang sama yaitu memberikan bantuan kepada petani dengan berbagai komoditi melalui kelompok tani, namun hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kondisi ini tentu akan menyebabkan peningkatan perekonomian masyarakat menjadi lambat. Kondisi seperti ini kurang menguntungkan dan Pemimpin Gayo Lues yang baru tidak ingin kalau program pemberdayaan ekonomi yang kurang efektif sebelumnya dilaksanakan kembali.

Berkaitan dengan itu maka Pemerintah Kabupaten Gayo Lues terus berupaya untuk membuat solusi dan mencari komoditi yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan bisa menjadi produk andalan daerah. Keinginan dan motivasi yang kuat agar pembangunan perekonomian masyarakat di Kabupaten Gayo Lues dapat berjalan dengan sukses dan memberikan hasil yang optimal, maka mulai pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Gayo Lues mencoba membuat kebijaksanaan yaitu membuat program kegiatan berupa pemberian bantuan sosial pemberdayaan ekonomi bagi petani yang melakukan usaha tanaman serai wangi, dan model penyaluran bantuan yang dilakukan tidak lagi seperti yang dilaksanakan selama ini melalui kelompok tani/organisasi akan tetapi dengan menggunakan model baru yaitu bantuan diberikan secara langsung ke individu atau perorangan.

Program bantuan sosial pemberdayaan ekonomi untuk petani serai wangi ini diartikan sebagai pemberian bantuan berupa barang/uang/jasa yang diberikan kepada petani serai wangi dengan tujuan untuk peningkatan pemanfaatan lahan tidur, menciptakan lapangan kerja, penggunaan teknologi pertanian, meningkatkan produksi usaha petani, meningkatkan pendapatan petani, dan akhirnya tercipta kesejahteraan

petani serai wangi di Kabupaten Gayo Lues. Sebagai payung hukum diterbitkan Peraturan Bupati Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 10 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, dan untuk mengatur secara operasional diterbitkan Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor 050/354/2013 Tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Tim Pengendali Koordinasi Percepatan Pembangunan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, juga dikeluarkan Keputusan Bupati Gayo Lues No. 050/167/2014 Tentang Tim Monitoring Pengendali Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Gayo Lues, serta pedoman penyaluran melalui Keputusan Bupati Gayo Lues nomor 900/ 614/ 2014 tentang pemberian bantuan sosial kepada petani Serai wangi Kabupaten Gayo Lues untuk biaya penanaman Serai wangi tahun 2014.

Komoditi serai wangi ini dipilih dan dibuat kebijakan khusus karena sejak berdirinya Pemerintah Kabupaten Gayo Lues dengan berbagai program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan, sebelum tahun 2013 program yang disalurkan belum pernah menyentuh petani serai wangi walaupun secara aturan bahwa program bantuan untuk pemberdayaan petani serai wangi diperbolehkan. Selain itu dilihat dari struktur tanah, jenis tanaman sangat sesuai dengan karakteristik masyarakat dan kondisi wilayah Kabupaten Gayo Lues yang wilayahnya dipenuhi oleh pohon pinus. Selama ini penyaluran bantuan sosial sebelum kebijakan ini dilakukan tampak masih mengalami permasalahan sebagaimana ditampilkan pada bagan diatas. Semua kelompok tani (Poktan) mengajukan permohonan bantuan kepada Dinas Perkebunan dan Kehutanan dengan mengajukan proposal bantuan. Setelah itu, petugas dari dinas melakukan verifikasi ke lapangan (Poktan) dan hasil verifikasi oleh Dinas akan di plot dan ditentukan kelompok tani (Poktan) yang akan memperoleh bantuan. Namun, pada saat pengambilan keputusan tersebut, belum tentu diberikan kepada yang benar-benar menerima bahkan terdapat 1 (satu) poktan menjadi anggota pada poktan yang lain. Selain itu, masalah penyaluran bantuan sosial tidak hanya pada objek bantuan, melainkan subjek pemberi bantuan. Permasalahan tersebut berupa penyaluran bantuan sosial yang sama dengan sumber yang berbeda (jenis dan nomenklatur bantuan

berbeda) didistribusikan kepada kelompok tani yang sama.

Implementasi Model Program Bantuan Sosial Pemberdayaan Ekonomi di Kabupaten Gayo Lues sangat ditentukan oleh model implementasi yang mampu menjamin kompleksitas masalah yang akan diselesaikan melalui kebijakan tertentu. Model implementasi kebijakan ini tentunya diharapkan model yang semakin operasional sehingga mampu menjelaskan kausalitas antar variable yang efektif dengan kebijakan. Setelah Kebijakan Program Bantuan Sosial

Pemberdayaan Ekonomi di Kabupaten Gayo Lues dirumuskan maka dalam implementasinya banyak faktor yang mendukung berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan, oleh karena aktivitas dalam implementasi acapkali menghadapi masalah atau kendala maupun tantangan. Dalam proses implementasi kebijakan ditekankan prosedur yang mengutamakan perubahan, control dan kepatuhan bertindak. Formulasi penyakuran bantuan kepada petani serai wangi dapat dilihat pada bagan berikut:

Proses Penyaluran Bantuan Sosial kepada Petani Sere Wangi

Berdasarkan bagan diatas, tampak bahwa proses penyaluran bantuan sosial kepada petani Serai Wangi secara struktur, dipimpin oleh seorang ketua yang membawahi BPKAD, Bappeda, dan Dinas Perkebunan dan Kehutanan serta Tim Monitoring dan Pengendali. Apabila petani Serai Wangi ingin memperoleh bantuan, maka harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya: 1) Memiliki lahan kosong kurang lebih 1 Ha yang cocok untuk budidaya Serai Wangi; 2) Mengajukan permohonan kepada ketua; 3) Bersedia mengerjakan/menanam serai wangi sebelum bantuan diberikan.

Setelah persyaratan dilengkapi, maka proposal diajukan kepada Ketua, dan memerintahkan Tim Monitoring dan

Pengendalian dan/atau Dinas Perkebunan dan Pertanian untuk melakukan verifikasi/peninjauan secara langsung kepada petani (individu). Hasil verifikasi dilaporkan kepada Ketua. Apabila hasil verifikasi memenuhi syarat, maka dimasukkan dalam daftar calon penerima bantuan. Bagi petani yang mendapatkan bantuan, akan dilegalkan dengan SK Kepala Daerah tentang Pemberian Bantuan kepada Petani Serai Wangi. Semua urusan administrasi keuangan dari petani, dikoordinir oleh tim monitoring dan pengendali. Hal ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat dalam pengurusan administrasi.

Pada Tahun 2013 Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues membuat kebijakan dengan konsep penyaluran yang berbeda dengan yang telah dilakukan selama ini. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues memberikan Bantuan Sosial pemberdayaan ekonomi dalam meningkatkan kemandirian

petani serai wangi, konsep penyaluran bantuan ini dibuat berkaitan atau tidak terlepas dari hasil analisis teori Grindle bahwa bantuan diberikan secara langsung kepada individu atau perorangan (*by name by address*), tidak kepada organisasi atau kelompok tani atau kebijakan yang diambil berdasarkan kondisi bukan kebijakan yang diambil untuk semua (*A policy for condition not a policy for all*). Untuk memperkuat legalitasnya maka Bupati Gayo Lues menerbitkan Peraturan Bupati atau (PERBUB) No 10 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Kebijaksanaan yang dibuat ini setelah di implementasikan ternyata memberikan hasil yang efektif. Hal ini dapat diketahui dalam pelaksanaan program bahwa bantuan yang diberikan kepada petani benar-benar sampai dan juga dikerjakan sesuai peruntukannya yaitu untuk penanaman serai wangi petani yang bersangkutan. Pada saat penelitian penulis melihat secara langsung ke lokasi pertanian masyarakat yang memperoleh program bantuan, dan ternyata tanamannya sudah berhasil tumbuh dan sudah produktif yang memberikan penghasilan kepada petani serai wangi. Penentuan Implementasi program bantuan social pemberdayaan ekonomi yang ditujukan kepada petani serai wangi bukan asal ditentukan atau karena ada unsur kepentingan atau sentiment pribadi, ini ditentukan terlebih dahulu dilakukan kajian dan analisis. Pemimpin daerah harus mampu melakukan pembangunan yang memberikan manfaat bagi peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat, agar keputusan yang diambil dalam menentukan sasaran dan berhasil maka pemimpin harus mampu menganalisisnya secara obyektif.

Dalam melaksanakan kebijakan tentu akan mengalami berbagai faktor penghambat dan pendukung, hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan terhadap implementasi bantuan sosial pemberdayaan ekonomi dalam meningkatkan kemandirian petani serai wangi di Kabupaten Gayo Lues analisis kebijaksanaan digunakan teori dari Grindle memperhatikan isi kebijaksanaan dan lingkungan kebijaksanaan.

Agar implementasi program bantuan social pemberdayaan ekonomi dalam meningkatkan kemandirian petani serai wangi dapat terlaksana secara efektif maka ada beberapa hal yang harus dilakukan yang

penulis sebut dengan konsep **PASTI** : Pertama adalah Pengawasan (P) yaitu suatu tindakan yang dilakukan sistematis sebagai upaya memastikan hasil yang dikerjakan sesuai dengan yang direncanakan dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin semua sumber telah dipergunakan sesuai peruntukan sehingga tujuan yang direncanakan dapat tercapai. Pelaksanaan implementasi program bantuan social pemberdayaan ekonomi dalam meningkatkan kemandirian petani serai wangi memiliki proses yang harus dilakukan, agar tujuan program dapat tercapai tanpa ada permasalahan yang dihadapi maka pengawasan sangat perlu dilakukan namun pengawasan yang dilakukan bukan pengawasan parsial tetapi pengawasan yang menyeluruh yang menyangkut program bantuan social. Dengan pengawasan yang ketat maka kemungkinan terjadinya penyimpangan akan semakin kecil sehingga peluang pencapaian tujuan program semakin besar.

Kedua adalah Akuntabilitas (A), merupakan pertanggungjawaban dari yang memiliki wewenang baik secara vertical maupun horizontal yang terkait dengan beban tugas yang diemban. Apa yang dilakukan dalam proses pelaksanaan implementasi program bantuan social pemberdayaan ekonomi dalam meningkatkan kemandirian petani serai wangi semuanya harus dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti bahwa semua yang dilakukan harus bersifat transparan sehingga tidak ada kecurigaan bagi pihak-pihak yang terkait.

Ketiga adalah Sumber Daya (S) yaitu potensi yang dimiliki dan dapat digunakan untuk tujuan tertentu. Setiap program dan kegiatan akan dapat dilakukan dengan baik untuk mencapai tujuan apabila adanya dukungan dari potensi atau sumber daya yang diperlukan, demikian juga halnya dengan implementasi program bantuan social pemberdayaan ekonomi dalam meningkatkan kemandirian petani serai wangi tentu tidak terlepas dari harus tersedianya sumber daya yang memadai dan adanya peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya, baik itu sumber daya manusia, sumber daya pendanaan, prasarana dan sarana serta adanya komitmen yang tinggi yang berkaitan dengan pelaksanaan program.

Keempat adalah Tindakan (T), yaitu sesuatu yang dilakukan atau perbuatan hukum (sanksi) yang merupakan alat memaksa dalam menegakkan aturan atau norma-norma hukum. Tidak selamanya implementor setiap program memiliki persepsi dan cara yang sama dalam melaksanakan program untuk mencapai tujuan, dalam penerapannya akan ditemui berbagai hambatan yang menyebabkan kemungkinan terjadi penyimpangan. Agar semua yang dilakukan dapat berjalan sesuai aturan maka penegakan supermasi hukum perlu ditegakkan. Tindakan atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku akan diberikan kepada implementor yang melaksanakan program Bantuan Sosial yang tidak sesuai dengan yang ditentukan. Kelima adalah Implementasi (I) adalah suatu tindakan penerapan secara nyata atau pelaksanaan dari rencana yang telah dibuat dengan rinci secara konsisten.

Pemerintah Indonesia memiliki banyak sekali skema bantuan pertanian yang tidak dapat dimanfaatkan oleh petani, khususnya

petani kecil. Program-program bantuan pertanian tersebut cukup banyak, mulai dari bantuan terkait budidaya tanaman, teknologi pertanian, penanggulangan hama, pupuk bersubsidi, peningkatan kualitas hasil produksi, pemasaran, hingga program-program bantuan yang spesifik, misalnya bantuan untuk membuat uji coba / pilot project atas suatu inovasi pertanian baru. Komitmen untuk meningkatkan nasib para petani kecil, seringkali sudah sangat jelas terlihat dalam dokumen kebijaksanaan mengenai program-program bantuan pertanian tersebut. Namun dalam praktek, program-program bantuan tersebut seringkali tidak terealisasi seperti dalam tujuan. Anggaran untuk bantuan pertanian tersebut seringkali tidak terserap, kelompok sasaran bantuan sering tidak terjangkau. Banyak kasus yang bisa memanfaatkan program bantuan tersebut bukan petani, apalagi petani kecil, tetapi justru kelompok-kelompok bukan petani. Salah satu persoalan yang menyebabkan situasi tersebut terjadi adalah tidak tersampainya informasi mengenai program-program bantuan pertanian tersebut kepada petani, khususnya petani kecil di pedesaan. Selain itu jika ada, informasi mengenai program-program bantuan tersebut sifatnya kurang memberdayakan, cenderung bersifat searah, dan tidak memberi informasi yang jelas. Justru seringkali keberadaan program-program bantuan pertanian dirasakan oleh petani kecil sebagai paksaan pada petani, dimana petani ditempatkan pada posisi "wajib" menerima program bantuan tersebut.

Menurut Sudjana (2000) mengatakan bahwa perencanaan adalah proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Sedangkan menurut Terry (1993) perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. Menurut Bintoro Tjokroaminoto adalah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang disebut perencanaan adalah kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan. Maka dari definisi ini perencanaan mengandung unsur-unsur: 1)

Sejumlah kegiatan yang ditetapkan sebelumnya, 2) Adanya proses, 3) Hasil yang ingin dicapai, dan 4) Menyangkut masa depan dalam waktu tertentu.

Jika dilihat dari program Bansos pemberdayaan ekonomi petani sere wangi di Kabupaten Gayo Lues maka yang menjadi sasaran program adalah para petani serai wangi yang memiliki lahan untuk ditanami, sasaran pada tahun 2014 seluas 500 hektar dengan jumlah anggaran Rp. 500.000.000; sedangkan sasaran pada tahun 2015 seluas 1.000 hektar dengan jumlah anggaran Rp. 1.000.000.000;

Isi kebijaksanaan berkaitan dengan kepentingan yang dipengaruhi, kesempatan, biaya, pembuatan keputusan, implementor program, sumber daya yang ada. Sedangkan *context of policy* lebih berkaitan dengan kekuasaan, kepentingan, strategi aktor yang terlibat, institusi dan sifat dari rezim yang ada, serta tanggung jawab. Tujuan kebijaksanaan adalah pencapaian tujuan kebijaksanaan melalui program aksi.

Defenisi sasaran menurut Komarudin (1990) dalam bukunya Manajemen berdasarkan Sasaran, yaitu: target adalah hasil akhir yang ingin dicapai melalui proses manajemen atau pernyataan hasil yang harus diperoleh, perlu dirumuskan dengan pasti. Dalam buku Komarudin berjudul Ensiklopedia Manajemen (1994), target adalah tujuan yang akan dicapai dan suatu tujuan-tujuan yang lebih terperinci yang ingin dicapai yang lazimnya dapat dinyatakan atau diukur secara kuantitatif.

Jika dilihat dari realisasi target program pemberdayaan ekonomi pada petani serai wangi di Kabupaten Gayo Lues, bahwa yang menjadi target sasaran program adalah luasan lahan petani serai wangi tahun 2014 seluas 500 hektar, dan pencapaian target dengan luas lahan 497 hektar dengan realisasi anggaran Rp. 497.000.000; atau pencapaian sebesar 99,4 % dari target. Pada tahun 2015 target sasaran seluas 1.000 hektar dan realisasi 999 hektar tanaman serai wangi dengan realisasi anggaran Rp. 999.000.000; atau pencapaiannya 99,9% dari target. Jika dilihat dari model pemberian bantuan kepada petani serai wangi yang dilakukan secara langsung kepada individu ternyata pencapaian target sangat efektif, bahkan hasil program bantuan social yang diberikan kepada petani serai

wangi membuahkan hasil yang sangat bagus. Ini terlihat dari tanaman serai wangi yang telah ditanam oleh petani dari dana bantuan yang diterimanya saat ini telah menjadi sumber pendapatan yang diandalkan oleh petani yang bersangkutan.

Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung

Faktor penghambat dilihat dari isi kebijaksanaan ini meliputi tujuan dikeluarkannya peraturan tersebut, kegunaan dan manfaat yang diterima oleh masyarakat dan pemerintah. yang berkaitan dengan sejauh mana kepentingan target group atau kepentingan sasaran termuat dalam isi kebijaksanaan sudah sangat jelas, kebijaksanaan yang dibuat berupa pemberian bantuan kepada para petani dan tentu ini merupakan salah satu unsur yang sangat dibutuhkan oleh petani.

Dalam penelitian ini yang menjadi faktor penghambat utama faktor dukungan sumber daya (*resources*) khususnya sumberdaya manusia baik sebagai petani maupun petugas untuk memonitoring dan memberikan penyuluhan pertanian, pengawasan, penyuluh harus memiliki keterampilan untuk melaksanakan kebijaksanaan, dukungan lingkungan kerja serta adanya kewenangan yang cukup untuk melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Faktor ini sangat penting perannya dalam pelaksanaan berbagai kegiatan. Sumber daya penghambat yang lain yaitu minimnya dukungan dana, sarana dan prasarana serta teknologi sehingga apa yang dilakukan oleh implementor belum dapat memberikan hasil yang terbaik.

Penghambat yang lain adalah menyangkut sanksi hukum, ketentuan bagi pihak yang terkait yang melanggar ketentuan pelaksanaan program akan diberikan sanksi sesuai dengan ketetapan perundang undangan yang berlaku, namun di dalam keputusan bupati belum ada termuat atau diatur ketentuan sanksi bagi pihak yang tidak menjalankan program sebagaimana mestinya. Walaupun belum ada termuat ketentuan sanksi namun karena konsep yang dijalankan penyaluran bantuan diberikan secara langsung kepada perorangan (*individu*) ternyata selama dua tahun pelaksanaan program partisipasi masyarakat masih sangat baik.

Faktor penghambat ditinjau dari segi lingkungan kebijaksanaan yang meliputi masih

ada aneka ragam kepentingan oknum implementor yang meliputi keseluruhan para aktor pelaksana dan pembagian tugas masing-masing. Implementasi kebijaksanaan public sangat penting untuk memberikan perhatian yang khusus kepada peran kelompok kepentingan (*interest group*) yang bertindak sebagai wakil pelaksana atau objek kebijaksanaan. Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam suatu kebijaksanaan public, maka para pelaksana sebenarnya dihadapkan pada dua permasalahan yaitu berkaitan dengan lingkungan interaksi program dan administrasi program. Idealnya lembaga-lembaga politik harus selalu tanggap terhadap perkembangan dan kebutuhan dari pihak-pihak yang membutuhkan atau yang akan menerima manfaat program. Dalam konteks penelitian ini, kebijakan pemberdayaan merupakan system yang berinteraksi dengan lingkungan social dan fisik. Dengan demikian pemberdayaan bukan merupakan upaya pemaksaan kehendak, proses yang dipaksakan, kegiatan untuk kepentingan pemrakarsa dari luar, keterlibatan dalam kegiatan tertentu saja, dan makna-makna lain yang tidak sesuai dengan pendelegasian kekuasaan atau kekuatan sesuai potensi yang dimiliki masyarakat. Faktor penghambat yang lain adalah factor lokasi usaha petani yang jauh dari tempat tinggal dan perbukitan, bahan bakar sulit dan nasih tradisional, hal ini menyebabkan petani mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya dengan sebaik-baiknya.

Faktor pendukung dalam rangka membangun perekonomian masyarakat agar lebih cepat dan terarah, maka Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Bupati No. 10 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Ekonomi. Peraturan ini menjadi payung hukum dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat termasuk implementasi program bantuan social pemberdayaan ekonomi dalam meningkatkan kemandirian petani serai wangi. Selain peraturan Bupati untuk mengatur secara teknis juga diterbitkan Surat Keputusan Bupati Gayo Lues nomor 900/ 614/ 2014 tentang pemberian bantuan sosial kepada petani Sere wangi Kabupaten Gayo Lues untuk biaya penanaman Sere wangi tahun 2014 dan Keputusan Bupati Gayo Lues nomor 900/ 258/ 2015 tentang pemberian bantuan sosial

kepada petani Sere wangi Kabupaten Gayo Lues untuk biaya penanaman Sere wangi mencakup : 1) Isi kebijakan yang jelas dan semua ketentuan mengenai Keputusan Bupati Gayo Lues nomor 900/ 258/ 2015 tentang pemberian bantuan sosial kepada petani Sere wangi Kabupaten Gayo Lues untuk biaya penanaman Sere wangi tahun 2015; 2) Adanya komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Apabila dihipunkan faktor pendukung keberhasilan implementasi program bantuan social pemberdayaan ekonomi : 1) Adanya peraturan sebagai payung hukum; 2).Adanya komitmen pelaksana menyukseskan program bansos; 3) Adanya tugas dan fungsi yang jelas bagi implementor; 4) Tujuan dan manfaat kebijaksanaan yang jelas; 5) Pelaksanaan kebijaksanaan yang akuntabel dn transparansi; 6) Ada koordinasi dan komunikasi dengan institusi terkait; 7) Ada tim monitoring (sumber daya manusia); 8) Kebijaksanaan mampu menyelesaikan masalah; 9) Peluang untuk pengembangan lahan luas; 10) Ada dukungan dari masyarakat.irian petani serai wangi di Kabupaten Gayo Lues.

Menurut Hogwood dan Gunn, dalam Solichin (2008) untuk dapat mengimplementasikan kebijaksanaan secara sempurna (*perfect implementation*) maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu, pertama adalah Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Artinya, bahwa komunikasi adalah perekat organisasi dan koordinasi adalah asal muasal dari kerjasama tim serta terbentuknya sinergi. Keputusan Bupati Gayo Lues nomor 900/ 614/ 2014 tentang pemberian bantuan sosial kepada petani Sere wangi Kabupaten Gayo Lues untuk biaya penanaman Sere wangi tahun 2014, Keputusan Bupati Gayo Lues nomor 900/ 258/ 2015 tentang pemberian bantuan sosial kepada petani Sere wangi Kabupaten Gayo Lues untuk biaya penanaman Sere wangi tahun 2015 komunikasi dan koordinasi untuk pelaksanaanya dilakukan oleh Dinas Keuangan sebagai penanggung jawabnya keuangan, sedangkan Dinas Kehutanan dan perkebunan untuk Penanggung jawab program dan badan penyuluhan Pertanian dan KP sebagai pemberi pengetahuan kepada petani Sere wangi.

Kedua adalah Kebijakan yang akan diimplikasikan didasari oleh suatu hubungan kualitas yang handal. Artinya bahwa kebijakan tersebut memang dapat menyelesaikan masalah yang hendak ditanggulangi. Keputusan Bupati Gayo Lues nomor 900/ 614/ 2014 tentang pemberian bantuan sosial kepada petani Sere wangi Kabupaten Gayo Lues untuk biaya penanaman Sere wangi tahun 2014, Keputusan Bupati Gayo Lues nomor 900/ 258/ 2015 tentang pemberian bantuan sosial kepada petani Sere wangi Kabupaten Gayo Lues untuk biaya penanaman Sere wangi tahun 2015. Penyelenggaraan keputusan bupati tersebut diharapkan memberikan landasan Hukum, sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pertanian Sere wangi di Kabupaten Gayo Lues.

SIMPULAN

Implementasi konsep program bantuan social pemberdayaan ekonomi untuk petani serai wangi di Kabupayten Gayo Lues dilakukan dengan menggunakan konsep penyaluran bantuan secara langsung kepada individu artinya bantuan diberikan tidak melalaui kelompok tani tetapi berdasarkan data nama dan alamat petani (*by name by address*). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep penyaluran pemberian bantuan *secaraby name by address* lebih efektif dibandingkan dengan konsep penyaluran pemberian bantuan melalui kelompok tani. Hal ini karena manfaat kebijakan yang lebih terukur, komitmen kerja pelaksanaan program lebih tinggi dan terjadi perubahan sikap dan perilaku yang lebih transparan dan bertanggung jawab serta memiliki semangat kerja yang tinggi sebagai akibat dari (1) pihak-pihak yang berkepentingan sangat sedikit dan pengaruhnya sangat rendah, (2) penguasa dan pelaksana menjalankan aturan program lebih konsisten, (3) pengambil keputusan hanya pada level pimpinan daerah, (4) merasa memiliki tanggung jawab dan transparansi dalam pengelolaan bantuan, (5) dan penerapan konsep **PASTI**, yaitu pengawasan yang menyeluruh,, penerapan akuntabilitas dan transparans, dukungan sumber daya, adanya tindakan snksi hokum,, implementasi program dilaksanakan penyaluran bantuan secara individu.

Faktor penghambat : Dilihat dari isi kebijakan ditemukan beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan program yang meliputi : masih kurangnya dukungan sumber daya (sumber daya manusia, sumber pendanaan, sarana prasarana, dan teknologi), Dukungan sumber daya manusia yang berkualitas dan relevan, tersedianya sumber pendanaan yang memadai, dukungan sarana dan prasarana yang bagus, serta adanya teknologi yang tepat guna dalam budidaya dan proses produksi adalah variable yang sangat diperlukan, selain itu. Dilihat dari konteks kebijakan faktor penghambat meliputi: Aneka kepentingan oknum implementor yang bterlibat pelaksanaan program, walaupun jumlahnya sedikit berupa oknum namun ini sangat mengganggu keberhasilan implementasi program. Penegakan hukum bagi yang melaksanakan program belum sesuai dengan peraturan, belum ditegakkan secara konsisten. Selanjutnya yang menjadi faktor penghambat adalah lokasi usaha petani serai wangu jauh dari tempat tinggal petani sehingga pada saat petani akan berusaha banyak waktu yang tersita.

Faktor Pendukung: Dilihat dari faktor isi kebijakan sebagai faktor pendukung diantaranya pengaruh kepentingan lebih sedikit karena adanya perubahan perilaku menjadi yang lebih bertanggung jawab, transparan, adanya kejelasan dari tugas dan fungsi program, motivasi kerja yang tinggi, ada koordinasi dan komunikasi yang baik, pengambilan keputusan langsung dilakukan oleh pimpinan daerah, serta adanya dukungan yang kuat dari masyarakat petani terhadap pelaksanaan implementasi program. Faktor pendukung dilihat dari konteks kebijakan meliputi: Adanya peraturan sebagai payung hkum implementasi program, kepentingan untuk kekuasaan lebih sedikit karena melaksanakan program berorientasi pemberdayaan ekonomi masyarakat yang lebih berpedoman kepada peraturan untuk mencapai tujuan program.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2010). Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell, J.W. (2010). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Dawson, C. (2002). *Practical Research Methods A User friendly Guide to Mastering Research*. Oxford: Deer Park Productions.
<http://habitat.ub.ac.id/index.php/habitat/article/view/155/12/02/16>.
<http://pls.upi.edu/?p=788.12/02/16>)
<http://prasetya.ub.ac.id/berita/Disertasi-Farahdilla-Kutsiyah-Pengembangan-Agribisnis-di-Pesantren-4738-id.html/12/02/16>)
<http://teoripemberdayaan.blogspot.co.id/2012/04/konsep-pemberdayaan-2.html/11/02/16>),
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gayo_Lues/12/02/16)
<https://obsessionnews.com/serai-wangi-tingkatkan-perekonomian-masyarakat-gayolues/12/02/16>).
<https://sangpangeranbiru.wordpress.com/2012/12/18/konsep-kebijaksanaan-sosial-dalam-hubungannya-dengan-keadilan-sosial/11/02/16>)
journal.unnes.ac.id/artikel_sju/edaj/5668/12/02/16)
Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor 050/166/2014 tentang Tim Pengendali Pemberdaayaan Ekonomi Masyarakat Kabupagten Gayo Lues Tahun 2014.
Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor 050/167/2014 tentang Tim Monitoring Pengendali Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Gayo Lues Tahun 2014.
Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor 050/188/2015 tentang Tim Pengendali Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Gayo Lues.
Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor 050/189/2015 tentang Tim Monitoring Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Gayo Lues.
Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor 900/258/2015 tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Petani Sere Wangi Kabupaten Gayo Lues Tahun 2015.
Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor 900/614/2014 tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Petani Sere Wangi Kabupaten Gayo Lues Untuk Biaya Penanaman Sere Wangi Tahun 2014.
Komarudin (2001), *ensiklopedi managemen Edisi IX*, Jakarta: Bumi Aksara
Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014.
Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 39 Tahun 2012.
Peraturan Menteri Keuangan Nomo 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan urusan bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010.
Purwanto, E. & Sulistyastuti, D. (2012) *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta.
Rasyid, M.R, (2000). *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Yarsif Watampone. Jakarta
Solichin, A.W. (2008). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*. Bumi Aksara. Jakarta.
Sudjana, (1996) *Metode Statistika*, Bandung: Penerbit Tarsito, 1996.
Surat Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor 050/353 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Tim Pengendali, Koordinasi Percepatan Pembangunan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
Surat Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor 050/354/2013 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Tim Pengendali Koordinasi Percepatan Pembangunan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013.
Tahjan (2007). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI. Tangkilisan, Luankali
Terry, G.R. (1993), *Prinsip-prinsip Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228,

tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 108, Nomor 15 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5426).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.